

# Chega!

**V o l u m e I**

## TERBITAN CAVR LAINNYA:

### Buku-buku Audiensi Publik:

Penahanan politik  
Perempuan dan konflik  
Pemindahan paksa dan kelaparan  
Pembantaian  
Konflik politik internal 1974 – 1976  
Penentuan nasib sendiri dan masyarakat internasional  
Anak dan konflik

### Buku-buku lain:

*Rona Ami-Nia Lian* (Dengarkan suara kami)  
Penjara Comarca Balide: Sebuah 'Gedung Sakral'  
Laporan Eksekutif Chega!

### Video dan radio dokumenter:

*Dalan ba Dame* (Jalan Menuju Perdamaian)



<http://www.cavr-timorleste.org>  
[info@cavr-timorleste.org](mailto:info@cavr-timorleste.org)

## UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

### Lingkup Hak Cipta

#### Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku.

### Ketentuan Pidana

#### Pasal 72:

1. Barangsiapa dengan sengaja atau tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2), dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah).
2. Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

# Chega!

Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran,  
dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

V o l u m e I

JAKARTA

KPG

# Chega!

## Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

### V o l u m e I

KPG: 950 04 10 0338

**Cetakan pertama, Agustus 2010**

**Penyusun:**

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Foto sampul:**

Poriaman Sitanggang

**Pembaca akhir:**

Rani Elsanti

**Desain dan tata letak:**

M. Roniyadi

Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di Timor-Leste

**Chega! Laporan Komisi Penerimaan, Kebenaran, dan Rekonsiliasi (CAVR) di  
Timor-Leste - Volume I**

Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia), 2010

xxx + 646 hlm; 150x230 mm

ISBN-13: 978-979-91-0244-7

Penerbitan buku ini didanai oleh Pemerintah Irlandia dan Jerman

Dicetak oleh PT Gramedia, Jakarta.

Isi di luar tanggungjawab percetakan.

Daftar isi

- xix** | Peta Timor-Leste
- xx** | Daftar donor
- xxi** | Prakata oleh Ifdhal Kasim,  
“Memaknai dan Memetik Pelajaran dari CAVR”
- xxiii** | Kata pengantar oleh Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR
- 1** | Surat penyerahan Laporan dari Komisaris Nasional CAVR

**3** | **Bagian 1: Pendahuluan**

- 7** | **Latar belakang Komisi**
  - 9** | Dari kolonialisme ke pendudukan militer
  - 13** | Pertemuan kembali: rekonsiliasi
  - 15** | Asas penyusunan Laporan
  - 15** | Kebenaran
- 17** | **Asal-mula Komisi**
  - 17** | Lokakarya dan Kongres CNRT
  - 18** | Hasil konsultasi publik Komite Pengarah
  - 20** | Memilih nama Komisi
  - 21** | Regulasi Nomor 10/2001, Pembentukan Komisi
  - 22** | Kantor Interim
  - 22** | Dewan Penasihat CAVR
- 23** | **Pembentukan Komisi**
  - 23** | Komisaris Nasional
  - 27** | Prinsip-prinsip dan misi Komisi
  - 28** | Komisaris Regional
- 29** | **Hal-hal dan tantangan operasional**
  - 29** | Tantangan praktis bagi kerja Komisi
  - 30** | Tantangan bahasa
  - 31** | Pendekatan terpadu berbasis komunitas
  - 35** | Rencana strategis
- 37** | **Program-program inti**
  - 37** | Pencarian kebenaran
  - 46** | Rekonsiliasi komunitas
  - 48** | Penerimaan dan dukungan korban

- 49 | Laporan akhir
- 51 | Arsip
- 52 | Kewajiban Komisi terhadap para peserta dalam program-program intinya
- 53 | Kantor nasional dan regional serta masalah kepegawaian
  - 53 | Kantor Nasional
  - 56 | CAVR sebagai institusi pembelajaran
  - 56 | Pengembangan institusi dan pembangunan kapasitas
  - 57 | Gender dan kepegawaian
  - 58 | Kantor Regional dan Tim Distrik
  - 59 | Gender dalam kerja distrik
  - 60 | Peran staf internasional dalam Komisi
- 61 | Manajemen dan administrasi
  - 61 | Struktur manajemen
  - 61 | Administrasi
  - 62 | Keuangan
  - 62 | Pengurangan staf dan restrukturisasi
- 63 | Membangun hubungan untuk masa depan
  - 63 | Hubungan langsung
  - 65 | Kampanye media dan informasi
  - 66 | Komunitas internasional
  - 67 | Penjangkauan komunitas dan informasi publik

## 75 | Bagian 2: Mandat Komisi

- 79 | Pendahuluan
  - 80 | Batasan waktu
  - 81 | Persoalan-persoalan dengan relevansi khusus
  - 81 | Makna 'berkaitan dengan konflik politik'
  - 81 | Pelanggaran hak asasi manusia
  - 82 | Definisi Komisi tentang 'pelanggaran hak asasi manusia'
  - 83 | Prioritas yang diberikan pada kategori pelanggaran tertentu
  - 84 | Wewenang yang berkaitan dengan penyelidikan
  - 85 | Tanggung jawab hukum Komisariss dan staf
  - 85 | Informasi rahasia yang diberikan kepada Komisi
  - 86 | Pemakaian nama-nama tertentu dalam Laporan
  - 90 | Berbagai standar yang digunakan untuk menentukan persoalan tanggung jawab dan pertanggungjawaban
  - 91 | Invasi Indonesia atas Timor-Leste
  - 91 | Keadilan perang dan keadilan dalam perang

- 93 | Prosedur Rekonsiliasi Komunitas
- 94 | Pendekatan Komisi yang berbasis-komunitas

- 95 | Lampiran: Prinsip-prinsip hukum yang relevan
  - 95 | Pendahuluan: Hukum internasional yang relevan

## 147 | Bagian 3: Sejarah konflik

- 157 | Pendahuluan
- 159 | Penjajahan Portugis atas Timor-Leste
  - 159 | Tinjauan
  - 160 | Kedatangan Portugis
  - 161 | Konsolidasi kekuasaan kolonial
  - 162 | Pemerintahan Portugis dan resistansi rakyat Timor
  - 164 | Timor Portugis pada abad ke-20
  - 165 | Gerakan internasional untuk dekolonisasi dan posisi Portugal
  - 166 | Rencana pembangunan Portugis dan berkembangnya sentimen anti-penjajah
- 167 | Perubahan di Portugal dan proses dekolonisasi
  - 167 | Tinjauan
  - 168 | MFA dan Revolusi Anyelir
  - 170 | Dampak Revolusi Anyelir di Timor Portugis
  - 170 | Pembentukan partai-partai politik di Timor Portugis
- 172 | Suasana internasional dan kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis
  - 172 | Tinjauan
  - 173 | Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Timor Portugis
  - 174 | Indonesia dan masyarakat internasional
  - 176 | Kebijakan Indonesia terhadap Timor Portugis
- 180 | Proses dekolonisasi dan partai-partai politik
  - 180 | Tinjauan
  - 180 | Permulaan kesadaran politik
  - 181 | Susunan partai-partai politik
  - 183 | Perkembangan dan ketegangan internal
  - 183 | Partai-partai politik bersiap menghadapi konfrontasi bersenjata
  - 186 | Fretilin dan ancaman komunisme
  - 188 | Tidak adanya toleransi politik
  - 189 | 'Misi mustahil' Lemos Pires
  - 190 | Koalisi antara UDT dan Fretilin

- 192 | Keterlibatan Indonesia yang semakin besar di Timor Portugis: Destabilisasi dan diplomasi
  - 192 | Tinjauan
  - 192 | Operasi Komodo dan peningkatan operasi rahasia militer
  - 193 | Diplomasi Indonesia
  
- 200 | Gerakan Bersenjata 11 Agustus dan konflik bersenjata internal
  - 200 | Tinjauan
  - 201 | UDT melancarkan gerakan bersenjata 11 Agustus
  - 203 | Kegagalan melakukan negosiasi: Konflik bersenjata internal
  - 205 | UDT mundur ke perbatasan
  - 206 | Tanggapan Portugal terhadap konflik internal
  - 206 | Tanggapan Indonesia
  
- 208 | Timor Portugis di bawah administrasi Fretilin
  - 208 | Tinjauan
  - 208 | Fretilin mengisi kekosongan
  - 209 | Tahanan dan kekerasan politik
  - 211 | Memulihkan ketertiban
  - 212 | Pemerintahan
  - 214 | Balibó: Indonesia meningkatkan intensitas operasi militer
  
- 216 | Deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin, dan tanggapan terhadapnya
  - 216 | Tinjauan
  - 216 | Latar-belakang deklarasi kemerdekaan sepihak Fretilin
  - 218 | Deklarasi kemerdekaan
  - 221 | Reaksi atas deklarasi kemerdekaan
  - 223 | Invasi besar-besaran di ambang pintu
  
- 224 | Invasi besar-besaran
  - 224 | Tinjauan
  - 224 | Keputusan Indonesia untuk menginvasi dan melakukan perang terbuka
  - 226 | Dili mempersiapkan strategi pertahanan
  - 226 | Berbagai persiapan militer Indonesia: Operasi Seroja
  - 227 | Invasi Dili dan Baucau
  - 232 | Tanggapan PBB terhadap invasi besar-besaran
  
- 233 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan dan upaya Indonesia untuk meresmikan integrasi
  - 233 | Tinjauan



- 234 | ABRI melakukan konsolidasi; Indonesia mendirikan ‘pemerintahan sementara’
- 235 | Fretilin mundur, pembantaian tahanan
- 235 | Pergerakan ABRI, awal 1976
- 236 | Pengalaman rakyat Timor pada awal pendudukan
- 237 | Fretilin kembali menyusun kekuatan
- 238 | Indonesia meresmikan integrasi
- 240 | Operasi Seroja berlanjut – pesawat Bronco OV-10 buatan AS mulai digunakan
- 240 | Kebuntuan militer, akhir 1976
  
- 241 | ‘Pengepungan dan penghancuran’: tahap akhir Operasi Seroja, 1977 – 1979
  - 241 | Tinjauan
  - 242 | Penduduk sipil di gunung-gunung
  - 242 | Kapasitas ABRI terkuras dan kepercayaan diri awal Fretilin
  - 243 | Amerika Serikat memimpin dalam mempersenjatai-ulang militer Indonesia
  - 244 | Perpecahan internal Fretilin dan pembersihan berdarah
  - 246 | ABRI mengintensifkan operasi militer: pengepungan dan penghancuran (Agustus 1977 – Agustus 1978)
  - 250 | Penyerahan diri: Turun dari Matebian
  
- 251 | Penyerahan diri, pemukiman kembali, dan kelaparan
  - 251 | Tinjauan
  - 252 | Penyerahan dan eksekusi tahanan
  - 253 | Kamp-kamp penampungan sementara
  - 254 | Kamp penahanan jangka panjang dan strategi keamanan ABRI
  - 255 | Wilayah tertutup
  - 256 | Bantuan ICRC dan CRS
  - 257 | Ataúro sebagai pulau penjara
  - 258 | Berbagai kamp penahanan ditutup
  
- 259 | Operasi keamanan
  - 259 | Tinjauan
  - 260 | Situasi di Dili dan seluruh Timor-Leste (1979 – 1980)
  - 261 | Pemberontakan pertama: Dili, Juni 1980
  - 261 | ‘Pagar betis’: Operasi Kikis
  - 264 | Konsekuensi operasi
  
- 265 | Membangun Resistansi kembali
  - 265 | Tinjauan
  - 266 | Sejumlah anggota Fretilin yang bertahan setelah serangan 1978 – 1979
  - 267 | Kembali menyusun kekuatan

269		Konferensi Reorganisasi Nasional (Maret 1981)
270		Pertumbuhan Resistansi
271		Resistansi di bawah pimpinan Xanana Gusmão: Menuju persatuan nasional
272		Gereja Katolik
273		Gencatan senjata 1983 dan masa sesudahnya
273		Tinjauan
274		Pemilu Indonesia di Timor-Leste: 1982
275		Perubahan personel sipil dan militer Indonesia, serta berbagai aksi Resistansi
275		Pendekatan baru militer Indonesia: Negosiasi
277		Genjatan Senjata
277		Pengangkatan Benny Moerdani sebagai Panglima ABRI: 1983
278		Monsignor Lopes dicopot
278		Gencatan senjata dirongrong
280		Berakhirnya gencatan senjata
282		Konsolidasi dan awal perubahan: 1984 – 1991
282		Tinjauan
283		Perkembangan Resistansi
284		Represi dan pemenjaraan
285		Kebangkitan gerakan pemuda klandestin
286		Gereja Katolik
287		Situasi di Perserikatan Bangsa-Bangsa
288		Kunjungan Paus Yohanes Paulus II
290		Jakarta membuka Timor-Leste
291		Perkembangan internasional menjelang akhir dasawarsa 1980-an
292		Titik-balik
292		Tinjauan
292		Pembantaian Santa Cruz, 12 November 1991
295		Dampak internasional Santa Cruz
296		Penangkapan Xanana Gusmão
297		Jaringan klandestin pelajar
299		Rencana damai CNRM dan inisiatif diplomatik
300		Kasus pengadilan internasional: Portugal vs. Australia (1991 – 1995)
301		Hadiah Nobel Perdamaian 1996
302		Perserikatan Bangsa-Bangsa
303		Dari Reformasi ke pengumuman tentang Jajak Pendapat

<b>303</b>		Tinjauan
<b>304</b>		Jatuhnya Soeharto
<b>306</b>		CNRT dan kampanye diplomatik
<b>306</b>		Dampak Reformasi di Timor-Leste
<b>307</b>		Munculnya para milisi
<b>310</b>		Xanana Gusmão mengimbau toleransi
<b>310</b>		Negosiasi tentang paket otonomi
<b>312</b>		Peningkatan teror milisi
<b>314</b>		Kesepakatan 5 Mei
<b>315</b>		Pengaturan keamanan dalam Kesepakatan 5 Mei
<b>316</b>		<b>Jajak Pendapat</b>
<b>316</b>		Tinjauan
<b>317</b>		Penempatan UNAMET
<b>317</b>		Komisi Pemilihan
<b>318</b>		Pilihan
<b>318</b>		Koordinasi pemerintah Indonesia untuk Jajak Pendapat
<b>318</b>		Kehadiran masyarakat internasional di Timor-Leste
<b>319</b>		Pemantau dari Timor-Leste dan Indonesia
<b>319</b>		Pengamanan untuk Jajak Pendapat
<b>321</b>		Kekerasan oleh TNI-Milisi: Juni – Juli
<b>322</b>		Dare II
<b>322</b>		Pendaftaran pemilih
<b>323</b>		Kampanye
<b>326</b>		Situasi keamanan memburuk: Agustus
<b>328</b>		Persiapan terakhir Jajak Pendapat
<b>328</b>		Jajak Pendapat
<b>329</b>		Penghitungan dan hasil
<b>330</b>		<b>Indonesia meninggalkan Timor-Leste: Bumi Hangus</b>
<b>330</b>		Tinjauan
<b>332</b>		Tindak kekerasan sesudah pengumuman hasil pemungutan suara
<b>333</b>		TNI resmi mengambil kendali
<b>335</b>		Markas UNAMET
<b>336</b>		Meningkatnya tekanan internasional
<b>338</b>		Evakuasi penduduk secara paksa
<b>339</b>		Interfet datang: TNI ditarik
<b>340</b>		Pembentukan UNTAET: Resolusi Dewan Keamanan 1272, 25 Oktober 1999
<b>341</b>		Pulang

## 371 | Bagian 4: Rezim pendudukan

### 375 | Pendahuluan

### 376 | Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan perannya di Timor-Leste

#### 376 | Pengantar

#### 377 | Latar-belakang ABRI

#### 385 | Struktur organisasi ABRI di Timor-Leste

### 396 | Militerisasi masyarakat Timor-Leste

#### 396 | Pendahuluan

#### 398 | Militerisasi Timor-Leste pra-Indonesia

#### 399 | Militerisasi partai politik Timor-Leste oleh Indonesia sebelum pendudukan

#### 401 | Pembentukan batalion tempur ABRI beranggotakan orang Timor-Leste

#### 402 | Berbagai kelompok paramiliter awal (1976 – 1981)

#### 403 | Paramiliter dekade 1980

#### 404 | Pasukan pertahanan sipil

#### 406 | 'Anggota militer triwulan', Milsas (1989 – 1992)

#### 407 | Tenaga Bantuan Operasi (TBO)

#### 408 | 'Intel'—mata-mata orang Timor-Leste

#### 410 | 1990-an dan perhatian pada pemuda

#### 411 | Pasukan pembunuh

#### 412 | Milisi (1988 – 1999)

### 424 | Pemerintahan sipil

#### 425 | Pemerintahan sementara di Timor-Leste

## 447 | Bagian 5: Resistansi: struktur dan strategi

### 451 | Pendahuluan

### 454 | Fretilin dan *base de apoio*

#### 455 | Pengorganisasian masyarakat sipil

#### 458 | Pengorganisasian militer

#### 461 | Program sosial-ekonomi Fretilin

#### 468 | Strategi

#### 471 | Perang rakyat jangka panjang

#### 473 | Konflik internal

### 480 | Akhir *base de apoio*

- 484 | Restrukturisasi Resistansi (1981 – 1987)
  - 485 | Restrukturisasi Resistansi untuk menghadapi keadaan baru
  - 490 | Strategi
- 495 | Falintil pasca-1987
- 503 | Gerakan perjuangan bawah-tanah

## 519 | Bagian 6: Profil pelanggaran hak asasi manusia

- 529 | Pendahuluan
  - 530 | Rangkuman temuan-temuan penting
  - 532 | Tinjauan manajemen informasi dan metode pengumpulan data Komisi
  - 533 | Estimasi pelanggaran bersejarah di Timor-Leste dan batasannya
- 536 | Pelanggaran-pelanggaran fatal: analisis
  - 536 | Latar-belakang dan tinjauan analisis statistik pelanggaran fatal
  - 538 | Tujuan analisis
  - 538 | Tinjauan data dan metode
  - 540 | Perkiraan pembunuhan, kematian karena kelaparan dan sakit, dan pemindahan
  - 550 | Analisis statistik deskriptif mengenai pelanggaran fatal yang dilaporkan kepada Komisi
- 571 | Pelanggaran nonfatal
  - 571 | Pengantar
  - 572 | Tinjauan temuan statistik mengenai pelanggaran nonfatal
  - 574 | Keterangan mendalam analisis statistik mengenai pelanggaran nonfatal
- 634 | Studi kasus Mau Chiga: analisis
  - 634 | Pengantar
  - 634 | Latar-belakang usaha pendokumentasian
  - 634 | Batasan data
  - 635 | Latar-belakang historis
  - 636 | Analisis statistik deskriptif pelanggaran yang dilaporkan pada Proyek Dokumentasi Mau Chiga
- 644 | Ringkasan dan kesimpulan

## Daftar tabel

<b>68</b>	Tonggak-tonggak sejarah Komisi
<b>386</b>	Struktur komando militer di Timor-Leste
<b>412</b>	Milisi-milisi di Timor-Leste, 1975 - 1999
<b>425</b>	Struktur pemerintahan Indonesia, dengan satuan yang setara dari sistem Portugis serta militer Indonesia
<b>430</b>	Komposisi anggota DPR Provinsi Timor Timur berdasarkan fraksi, 1980 - 1997
<b>434</b>	Bupati berdasarkan asal-usul dan afiliasi, 1976 - 1999
<b>456</b>	Struktur regional Fretilin mulai Mei 1976
<b>457</b>	Struktur administrasi Fretilin
<b>488</b>	Pembagian wilayah (region) secara militer pada Konferensi Reorganisasi Nasional
<b>552</b>	Penghitungan kejadian pembunuhan penduduk sipil, 1975
<b>556</b>	Pembunuhan dan penghilangan yang dilaporkan
<b>560</b>	Persentase pertanggungjawaban atas pembunuhan yang dilaporkan, berdasarkan periode, 1975 - 1999
<b>569</b>	Pelanggaran yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
<b>570</b>	Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
<b>571</b>	Pelanggaran fatal yang dilaporkan dan penahanan, berdasarkan tahapan, 1974 - 1999
<b>575</b>	Pelanggaran nonfatal berdasarkan sumber data, 1974 - 1999
<b>577</b>	Distribusi relatif korban per pelanggaran, data CAVR
<b>577</b>	Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Fokupers
<b>578</b>	Distribusi relatif korban per pelanggaran, data Amnesty International
<b>582</b>	Pelanggaran nonfatal yang dilaporkan kepada Komisi
<b>595</b>	Pelanggaran berdasarkan distrik
<b>600</b>	Pola korban menurut jenis kelamin
<b>600</b>	Pola korban menurut jenis kelamin dalam lintas waktu
<b>602</b>	Pola korban menurut jenis kelamin di tiap distrik
<b>603</b>	Pola korban menurut usia
<b>603</b>	Pola korban menurut usia per tahun, 1974 - 1999
<b>605</b>	Pola korban menurut usia per distrik
<b>612</b>	Tabel distribusi data berdasarkan data CAVR, Fokupers, Amnesty International
<b>623</b>	Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis pelanggaran, 1974 - 1999
<b>624</b>	Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan tahap, 1974 - 1999
<b>625</b>	Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan distrik, 1974 - 1999
<b>626</b>	Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan jenis kelamin, 1974 - 1999
<b>626</b>	Pelanggaran yang tercatat dan konteks penahanannya, berdasarkan usia korban, 1974 - 1999

- 638** | Tabel penyebaran lamanya periode dari peristiwa pemindahan penduduk Mau Chiga, 1982 - 1985
- 639** | Tabulasi silang lamanya periode tindak pemindahan penduduk Mau Chiga menurut lokasinya, 1982 - 1985
- 642** | Tabel penyebaran pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik korban, 1974 - 1999
- 642** | Penyebaran pelanggaran-pelanggaran fatal yang dilaporkan menurut afiliasi politik dan lokasi geografis, 1974 - 1999

## Daftar grafik

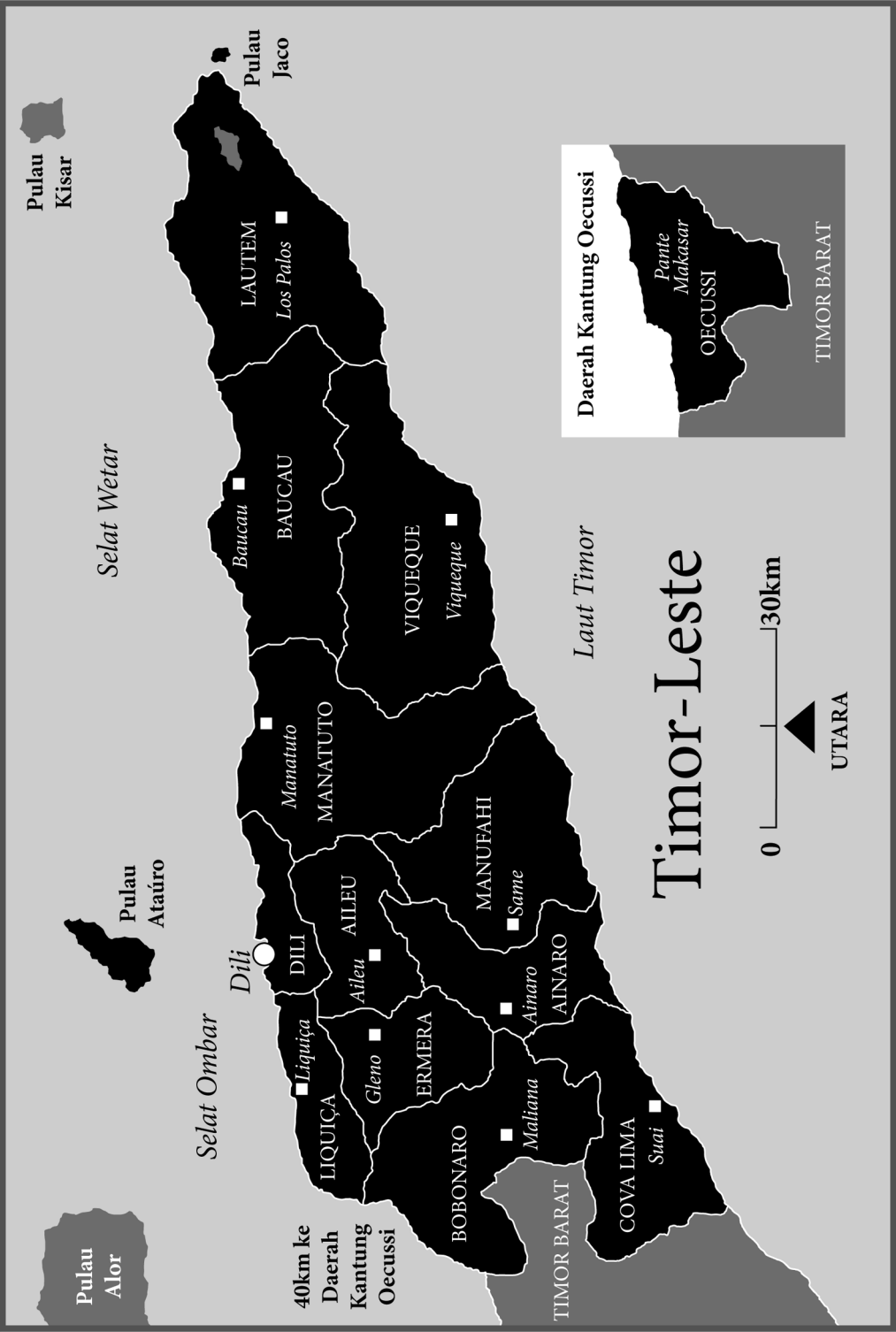
- 540** | Perkiraan jumlah total pembunuhan di Timor-Leste
- 541** | Perkiraan total pembunuhan di Timor-Leste
- 544** | Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 545** | Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 546** | Perkiraan total kematian akibat kelaparan/penyakit di Timor-Leste
- 548** | Perkiraan peristiwa pemindahan di Timor-Leste (dengan rentang kesalahan)
- 549** | Jumlah total rumah tangga yang terpindahkan di Timor-Leste berdasarkan daerah
- 551** | Jumlah kejadian pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 552** | Jumlah kejadian penghilangan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 553** | Penghitungan pelanggaran yang dilaporkan, berdasarkan jenis dan distrik
- 554** | Jumlah penghilangan berdasarkan wilayah secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 555** | Jumlah pembunuhan penduduk sipil secara lintas-waktu, 1974 - 1999
- 558** | Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan teritorial
- 558** | Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh satuan nonteritorial
- 559** | Pelanggaran fatal secara lintas-waktu, 1974 - 1999, yang dilakukan oleh pasukan Pertahanan Sipil
- 561** | Jumlah korban penduduk sipil berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 561** | Jumlah korban tindakan penghilangan berdasarkan ukuran kelompok, 1974 - 1999
- 562** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 563** | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 564** | Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565** | Angka tindak pembunuhan penduduk sipil, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 565** | Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 566** | Tingkat pelanggaran pembunuhan penduduk sipil yang spesifik berdasarkan usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999

- 566 | Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 567 | Tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 568 | Jumlah tindak pembunuhan penduduk sipil yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 568 | Jumlah tindak penahanan yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 579 | Jumlah pelanggaran nonfatal yang dilaporkan, 1974 - 1999
- 580 | Jumlah penahanan, penyiksaan, dan penganiayaan yang dilaporkan, 1999
- 581 | Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 583 | Jumlah pelanggaran nonfatal yang dikaitkan dengan Fretilin, UDT, dan Apodeti, 1975
- 584 | Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 585 | Pelanggaran nonfatal yang dilakukan oleh satuan Pertahanan Sipil dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 585 | Pelanggaran yang dilakukan oleh Kopassus dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586 | Pelanggaran yang dilakukan oleh Polisi dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 586 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 587 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1999
- 588 | Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 589 | Tindak penyiksaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590 | Tindak penganiayaan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 590 | Tindak penahanan yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 591 | Tindak penyiksaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 591 | Tindak penganiayaan yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 592 | Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 593 | Tindak pelanggaran berbasis seks yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1999
- 594 | Tindak pelanggaran ekonomi/properti yang tercatat yang dikaitkan dengan TNI, Polisi, dan pasukan pembantu Timornya, 1974 - 1999
- 596 | Bagan pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 597 | Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 598 | Jumlah pelanggaran nonfatal berdasarkan wilayah dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 606 | Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 606 | Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 607 | Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999



- 607 | Tingkat penahanan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608 | Tingkat penyiksaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 608 | Tingkat penganiayaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 609 | Jumlah tindak pemerkosaan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 609 | Tingkat pemerkosaan spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610 | Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 610 | Tingkat perbudakan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 611 | Jumlah kekerasan seksual yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 611 | Tingkat kekerasan seksual spesifik usia-jenis kelamin (per 10.000 orang), 1974 - 1999
- 614 | Pelanggaran dalam lintas-waktu
- 615 | Jumlah korban tindakan penahanan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 615 | Jumlah korban tindakan penyiksaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 616 | Jumlah korban tindakan penganiayaan berdasarkan ukuran kelompok korban, 1974 - 1999
- 617 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618 | Jumlah tindakan penyiksaan yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 618 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619 | Jumlah tindakan pengancaman yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 619 | Jumlah tindakan kekerasan berbasis seksual yang tercatat, dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 620 | Jumlah pelanggaran yang tercatat, berdasarkan jenis dan distrik
- 621 | Pelanggaran dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 628 | Jumlah tahanan yang tercatat di Ataúro, Juni 1980 - Oktober 1984
- 628 | Jumlah penahanan yang tercatat, di dalam dan di luar Ataúro, 1974 - 1999
- 629 | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 630 | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1979
- 630 | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1980 - 1989
- 631 | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1990 - 1998
- 631 | Pelanggaran nonfatal yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1999
- 632 | Jumlah penahanan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban
- 632 | Jumlah penyiksaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban

- 633** | Tindakan penganiayaan yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 633** | Tindakan pelanggaran properti/ekonomi yang tercatat, berdasarkan afiliasi korban, 1974 - 1999
- 637** | Jumlah korban pemindahan yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999
- 640** | Pelanggaran fatal dalam lintas-waktu, 1974 - 1999
- 644** | Jumlah kematian akibat kelaparan/sakit yang tercatat, berdasarkan usia dan jenis kelamin, 1974 - 1999



Tugas Komisi telah dimungkinkan berkat kebaikan dan bantuan dari organisasi pemerintah, lembaga multilateral, dan organisasi non-pemerintah berikut ini:

- Australian Business Volunteers
- Australian Volunteers International
- Australian Youth Ambassadors for Development
- Australia-East Timor Capacity Building Facility
- Benetech (Human Rights Data Analysis Group)
- Catholic Relief Services (Amerika Serikat) di Kupang
- Community Empowerment Program (CEP), didanai oleh Trust Fund for East Timor dan dikelola oleh Bank Dunia
- HIVOS (Belanda)
- International Center for Transitional Justice
- Kantor Komisi Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia
- Komisi Eropa
- MCC (Mennonite Central Committee)
- PBB (melalui UNTAET, UMNISSET, dan UNOTIL)
- Pemerintah Amerika Serikat
- Pemerintah Australia melalui AusAID
- Pemerintah Denmark
- Pemerintah Finlandia
- Pemerintah Jerman melalui GTZ
- Pemerintah Irlandia
- Pemerintah Jepang
- Pemerintah Kanada melalui CIDA
- Pemerintah Kerajaan Inggris
- Pemerintah Norwegia
- Pemerintah Portugal
- Pemerintah Selandia Baru
- Pemerintah Swedia
- Pikul, Timor Barat
- UNDP
- UNHCR
- UN Volunteers
- United States Institute for Peace

# Prakata

## Memaknai dan Memetik Pelajaran dari CAVR

Oleh: Ifdhal Kasim, Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM)

Pada 2005, laporan dari Komisi Penerimaan Kebenaran dan Rekonsiliasi (CAVR), yang berjudul *Chega!* (kata dalam bahasa Portugis yang berarti “tidak lagi, hentikan, cukup!”) diserahkan kepada Presiden Timor-Leste, Xanana Gusmao, setelah proses panjang mendokumentasi pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi selama kurun waktu 1975-1999.

*Chega!* merangkai lebih daripada 8.000 kesaksian korban dan saksi serta lebih daripada 1.300 kesaksian mantan milisi yang mengikuti proses rekonsiliasi yang difasilitasi oleh CAVR. CAVR menemukan bahwa Indonesia bertanggungjawab atas kejahatan terhadap kemanusiaan dan kejahatan perang yang terjadi selama Timor Timur menjadi de facto provinsi ke-27 Indonesia. CAVR juga menemukan bahwa gerakan perlawanan di Timor-Leste melakukan kejahatan perang dan pelanggaran lainnya, namun dalam skala yang jauh lebih kecil dari pelanggaran yang dilakukan oleh aparat keamanan Indonesia. (Pada saat laporan ini dipublikasikan, seorang pejabat tinggi Indonesia membuat pernyataan yang menyangkal temuan CAVR tentang penggunaan bom kimia [*napalm*] pada operasi militer di Timor-Leste. Selain itu, tidak ada tanggapan yang berarti, meskipun CAVR merekomendasi bahwa *Chega!* didiseminasi seluas-luasnya di Indonesia, dan pihak Indonesia mengakui dan meminta maaf atas pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang telah terjadi.)

Tiga tahun kemudian Komisi Kebenaran dan Persahabatan (KKP), sebuah komisi yang dibentuk secara bilateral oleh kedua pemerintah Indonesia dan Timor-Leste, meluncurkan sebuah laporan yang diberi judul Per Memoriam Ad Spem yang berarti “Dari Ingatan Menuju Harapan”. Laporan ini telah membuka kebenaran yang selama ini disangkal, suatu “*conclusive truth*” tentang apa yang terjadi sekitar Jajak Pendapat 1999. Memang dibanding temuan CAVR, tak banyak hal yang baru diungkap di dalamnya. Tetapi nilai terpenting laporan KKP ini adalah mengubah tabiat yang suka menyangkal (*culture of denial*) di kalangan penguasa kita ke arah pengakuan terhadap kebenaran; mengakui kesalahan yang pernah dilakukan. Perlu dicatat bahwa CAVR memiliki mandat yang lebih luas daripada penyelidikan yang dilakukan oleh KKP maupun KPP-HAM yang dibentuk Komnas HAM sebelumnya. Laporan CAVR mendokumentasikan pelanggaran yang terjadi selama 25 tahun antara 1975 – 1999, dan menyertakan temuan-temuan serta rekomendasi. Perinciannya dapat dibaca dalam buku dengan lima volume ini.

*Chega!* merupakan sebuah kesaksian yang meresahkan. Laporan ini akan menyentak para pembaca Indonesia yang mengira bahwa di bawah rezim Soeharto semuanya berjalan damai di provinsi Indonesia ke-27 saat itu. Halaman demi halaman kita dapat membaca cerita-cerita korban pembantaian, perkosaan, penghilangan paksa, penyiksaan, dan berbagai kejahatan yang tidak terbayangkan. Terlihat dengan jelas betapa sebuah keangkuhan yang menjustifikasi digunakannya kekerasan demi pencapaian target politik akhirnya akan gagal. Membaca sejarah pelanggaran hak asasi manusia yang bertubi-tubi terjadi di Timor-Leste akan membantu kita memahami dengan lebih baik mengapa setelah 24 tahun sebagian besar orang Timor-Leste memilih untuk berpisah dari Indonesia.

Presiden Ramos-Horta telah mendorong rakyat Timor-Leste untuk belajar dari *Chega!*. Demikian pula masyarakat di Indonesia dapat belajar dari *Chega!* Berkat penerbitan laporan tersebut oleh KPG, pembelajaran ini menjadi dimungkinkan. Laporan ini adalah suatu kontribusi penting ke arah demokratisasi di Indonesia dan reformasi sektor keamanannya. Temuan serta rekomendasi-rekomendasinya sebaiknya disebarluaskan dan didiskusikan dengan bebas, guna menghapuskan impunitas dan memastikan agar pelanggaran semacam itu tidak terulang kembali di Indonesia atau di manapun.

Temuan-temuan CAVR sangat penting bagi kita sebagai bangsa. Temuan CAVR ini menjadi cermin bagi kita, dan menjadikannya sebagai pelajaran yang berharga agar tidak mengulangi lagi di masa depan. Untuk itu, langkah-langkah pembaruan institusi-institusi yang terkait dalam berbagai pelanggaran yang telah dipaparkan harus kita ambil. Selain itu, yang lebih penting sekarang adalah melaksanakan tanggung jawab kita, yang tertuang dalam rekomendasi-rekomendasi CAVR dan KKP tersebut. Pelaksanaan rekomendasi tersebut akan memastikan kita menyatakan: *Nunca Mais!*

# Kata Pengantar

Pidato oleh Aniceto Guterres Lopes, Ketua CAVR\*

**Y**ang Mulia, Presiden Kay Rala Xanana Gusmão; Presiden Parlemen Nasional Francisco Guterres Lú-Olo; Perdana Menteri Dr. Mari Alkatiri; Ketua Pengadilan Tinggi Dr. Claudio Ximenes; Dr. Sukehiro Hasegawa, Wakil Khusus Sekretaris Jenderal; Para Anggota Parlemen; Para Menteri Pemerintah; Yang terhormat anggota Korps Diplomatik dan komunitas donor. Para wakil Gereja, komunitas keagamaan, dan organisasi-organisasi non-pemerintah, Rekan-rekan Komisaris dan staf CAVR, teman-teman yang terkasih.

Hari ini adalah hari terakhir dari masa amanat operasi CAVR dan kesempatan bagi CAVR untuk menggenapi tugas terakhirnya—penyerahan Laporan kami kepada Presiden Republik. Laporan ini telah ditulis sesuai dengan Regulasi 10/2001 yang mewajibkan Komisi ini menyusun dan menyampaikan kepada umum suatu laporan mengenai kegiatan-kegiatannya, temuan-temuannya, dan rekomendasi-rekomendasinya mengenai pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi dalam konteks konflik politik selama kurun waktu 25 tahun mulai 1974 sampai dengan 1999. Sesuai dengan amandemen Parlemen Nasional, Regulasi ini mengharuskan Komisi untuk menyampaikan Laporanannya kepada Presiden Republik sebelum ditutup. Itulah sebabnya mengapa kita berada di sini pada hari ini.

Lima tahun telah berlalu sejak CAVR digagas pada tahun 2000. Dalam tahun-tahun ini Timor-Leste telah mengalami kemajuan dalam banyak hal dan terus melangkah ke depan. Kalau begitu, mengapa ketika Timor-Leste mengarahkan pandangan ke masa depan disampaikan suatu Laporan mengenai masa lalu?

## Kegunaan sejarah

Jawaban sederhana untuk pertanyaan ini ialah bahwa Komisi melakukan apa yang diminta darinya, yaitu menyelidiki dan melaporkan masa lalu kita yang tragis. Karena hasil dari tugas ini adalah suatu Laporan yang menyentuh banyak masalah yang sulit dan peka, penting untuk mengingat bahwa CAVR secara resmi ditugaskan untuk melaksanakan pekerjaan ini. Tugas Komisi ditetapkan oleh hukum, ditulis dalam Konstitusi, disahkan oleh Parlemen sekarang pada lebih daripada dua kesempatan, dan didukung oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa serta masyarakat

.....  
\* Presentasi Laporan CAVR kepada Presiden Republik dan penutupan CAVR / Salão Nobre, Lahane, 31 Oktober 2005

internasional. Para Komisaris rekan saya dan saya diharuskan di bawah sumpah untuk menyampaikan, tanpa rasa takut maupun pemihakan, kebenaran mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan semua pihak dalam gejolak perjalanan Timor-Leste menuju kemerdekaan. Ini meliputi penyampaian kebenaran mengenai peran masyarakat internasional. Laporan yang ada di hadapan Anda sekalian ini bukanlah hasil prakarsa atau semangat pribadi. Ia adalah hasil dari suatu proses yang secara resmi dimandatkan oleh Negara.

Akan tetapi, pertanyaan tersebut menimbulkan pertanyaan yang lebih mendalam: mengapa Timor-Leste memilih menghadapi masa lalunya yang sulit? Sebagai negara miskin sumberdaya yang dibebani dengan tantangan yang luarbiasa, bisa saja Timor-Leste tidak melakukan apa-apa atau memilih memaafkan dan melupakan. Tetapi bangsa kita memilih pertanggungjawaban untuk pelanggaran hak asasi manusia masa lalu, menyelenggarakannya secara menyeluruh untuk kejahatan berat dan kurang berat—tak seperti sebagian negara yang keluar dari konflik dan memusatkan perhatian hanya pada satu atau dua masalah, serta memperlihatkan betapa orang-orang dan masyarakat mengalami kerusakan luarbiasa apabila kekuasaan digunakan dengan impunitas. CAVR didirikan sebagai bagian dari proses ini. Seperti mekanisme keadilan transisional lainnya di Amerika Latin, Afrika, dan Eropa, misi kami adalah menegakkan pertanggungjawaban untuk memperdalam dan memperkuat prospek bagi perdamaian, demokrasi, penegakan hukum, dan hak asasi manusia di negara kita yang baru merdeka ini. Inti darinya adalah pengakuan bahwa korban tidak hanya punya hak atas keadilan dan kebenaran tetapi bahwa keadilan, kebenaran, dan rasa saling memahami itu sangat mendasar bagi pemulihan dan rekonsiliasi orang-orang dan bangsa. Misi kami tidak digerakkan oleh keinginan balas dendam atau keterpesonaan yang kelim ataupun politis terhadap masa lalu. CAVR diwajibkan untuk mengarahkan perhatian pada masa lalu demi kepentingan masa depan—masa depan Timor-Leste dan masa depan sistem internasional yang, sebagaimana diperlihatkan oleh Laporan ini, juga harus banyak belajar dari pengalaman Timor-Leste.

Keputusan para pemimpin kami untuk menghadapi masa lalu melalui proses CAVR mendapat dukungan luas masyarakat. Buktinya bisa dilihat dalam kerjasama luarbiasa yang diberikan kepada semua kegiatan Komisi oleh semua lapisan masyarakat. Ribuan orang Timor-Leste dari seluruh penjuru negeri memberikan pernyataan pribadi kepada CAVR dan, berpartisipasi serta mendukung acara dan pertemuan rekonsiliasi di tingkat distrik dan nasional meskipun partisipasi itu kerap menimbulkan rasa sakit. Pemerintah, Parlemen, partai-partai politik, tokoh-tokoh politik penting, masyarakat sipil, dan Gereja setiap saat juga memberikan kerjasama yang luarbiasa baik, secara moral maupun praktis. Dukungan yang diberikan kepada CAVR itu sedemikian rupa sehingga CAVR tidak pernah sekalipun mempertimbangkan untuk menggunakan wewenangnyanya untuk menggeledah dan menyita. Hanya satu kesimpulan yang bisa ditarik: rakyat Timor-Leste sangat memahami prinsip-prinsip dan proses CAVR sebagai cara terbaik untuk membangun masa depan yang stabil dan bebas dari kekerasan yang telah menodai masa lalu kita.



## Laporan CAVR

Perkenalkan saya untuk menyampaikan beberapa patah kata mengenai Laporan ini.

Laporan ini sangat panjang, lebih daripada 2.000 halaman. Ada dua sebabnya. Pertama, mandat CAVR meliputi masa 25 tahun konflik berkepanjangan yang mencakup berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Juga ada banyak pelaku yang terlibat, baik dalam negeri maupun internasional, sehingga menghasilkan suatu campuran yang rumit dan dinamis dari berbagai faktor. Banyak halaman diperlukan untuk mencatat semua ini. Kedua, Laporan ini adalah semacam perjanjian dengan para korban. Laporan ini didasarkan terutama pada kesaksian dari para korban dan dimaksudkan untuk menyumbang kepada penyembuhan melalui pemulihan martabat mereka. Ini juga memerlukan ruang. CAVR berharap agar para korban akan melihat pengalaman dan penderitaan mereka tecermin jelas dalam Laporan ini dan mengetahui bahwa yang terjadi pada mereka dihargai di Timor-Leste dan dipelihara untuk semua generasi mendatang. Selain mengeluarkan Laporan Akhir, CAVR juga menerbitkan kesaksian terpilih dengan kata-kata para korban sendiri yang disampaikan dalam tujuh audiensi publik nasional kami. CAVR berharap bahwa pengutamaan kepentingan dan cara pandang para korban dan orang-orang yang selamat dengan cara seperti ini akan menyumbang lebih jauh pada pemulihan dan perwujudan suatu masa depan yang bebas dari kekerasan.

Meskipun merupakan medium yang sangat terperinci dan deskriptif untuk suara-suara banyak orang Timor-Leste yang menjadi korban, Laporan ini adalah hasil penyelidikan dan penelitian yang tidak memihak dan dilakukan dengan teliti dan seksama. Mandat kami mengharuskan CAVR untuk menetapkan berbagai kecenderungan, pola, dan faktor. Mandat juga mengharuskan CAVR untuk menetapkan pertanggungjawaban dan mengidentifikasi orang, badan, lembaga, dan organisasi yang bertanggungjawab atas terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam melaksanakan tugas tersebut, CAVR tidak mempunyai agenda politik dan dengan teliti menghindari pelebih-lebihan atau keinginan untuk menghinakan atau membalas dendam. Di masa lalu, pelanggaran hak asasi manusia bisa saja digunakan untuk memobilisasi dukungan politik dan menjatuhkan pihak lawan. Satu-satunya tujuan CAVR adalah mencatat kebenaran sehingga akibat-akibat yang mengerikan dari kekerasan yang terekam dalam dokumen ini dapat menangkal pengulangannya di masa depan dan mengakhiri impunitas. Hasilnya tidak sempurna, tetapi CAVR tidak memiliki kemampuan untuk menyelidiki semua kasus atau menyimpulkan kebenaran mengenai semua masalah. Tetapi kami percaya bahwa Laporan ini memberi rakyat Timor-Leste gambaran besar tentang apa yang terjadi selama 25 tahun dan akan membantu masyarakat mengerti sejarah kita dan kekuatan-kekuatan yang telah berpengaruh pada nasib kita.

Berlawanan dengan panjangnya Laporan ini, judulnya hanya satu kata. Yaitu kata bahasa Portugis “Chega!” yang terjemahannya kira-kira adalah “tidak lagi, berhenti, cukup!” Kami merasa bahwa satu kata ini, yang menjadi judul untuk versi semua bahasa, menangkap pesan inti seluruh laporan ini dengan cara yang memikat. Kami yakin ini juga merupakan pesan inti yang diinginkan para korban untuk kita semua

dengarkan dan janjikan, yaitu bahwa mimpi buruk perorangan dan masyarakat yang diuraikan dalam Laporan ini tidak boleh terulang kembali.

Dalam menyusun Laporan ini, CAVR harus bekerja dalam beberapa bahasa dan menyampaikan Laporan ini dalam beberapa bahasa. Ini adalah keharusan resmi dan praktis yang memberikan beban berat tambahan pada Komisi. Akan tetapi saya ingin menegaskan bahwa CAVR juga sangat menyadari bahwa “Persoalan Timor-Leste,” begitu yang selama ini disebut dalam Perserikatan Bangsa-Bangsa, adalah persoalan internasional, dan penting untuk menjamin bahwa Laporan ini bisa dimengerti oleh pihak-pihak yang berkepentingan dalam bahasa mereka masing-masing. Laporan ini akan tersedia dalam bahasa Portugis, Indonesia, Inggris, dan setidaknya sebagian dalam bahasa Tetum. Dalam hal ini saya harus membuat jelas bahwa para Komisaris secara resmi mengesahkan teks Laporan ini dalam bahasa Indonesia. Kami memeriksa teks dalam bahasa-bahasa lain tetapi versi bahasa Indonesia dari Laporan ini yang harus dijadikan pegangan kalau ada salah penafsiran mengenai Laporan atau kerancuan mengenai apa yang ingin kami sampaikan.

## Arsip

Dalam melaksanakan penelitiannya, CAVR mengumpulkan banyak dokumentasi untuk kurun waktu 1974 – 1999. Bukti yang sangat banyak ini sekarang hampir memenuhi dua ruang besar di Comarca. Saya ingin menyampaikan empat hal mengenai koleksi ini. Pertama, arsip ini unik dan harus dijaga dengan sangat hati-hati—ini adalah kesaksian hidup dari para korban dan aktor penting dari periode yang menyaksikan baik lahirnya negeri ini dengan penuh kesakitan, maupun tahapan memalukan dalam politik internasional. Ia merupakan sumber yang sangat bernilai untuk Departemen Pendidikan dalam mengembangkan kurikulum dan bahan-bahan untuk pengajaran di kelas dan ruang-ruang ceramah. Karena itu saya berharap bahwa arsip ini akan mendapatkan dukungan berkelanjutan untuk menjamin kelestarian, aksesibilitas, dan penggunaan dalam jangka panjang. Ketiga, koleksi ini harus terus diperkaya melalui sumbangan-sumbangan lain. Saya menggunakan kesempatan ini untuk menyerukan kepada seluruh rakyat Timor-Leste yang punya bahan-bahan yang berhubungan dengan periode 1974 – 1999, baik di dalam maupun di luar negeri, untuk menyumbangkan arsipnya, yang asli maupun salinannya, kepada pusat penyimpanan nasional ini. Dan keempat, harus dilakukan segala kehati-hatian untuk menjamin bahwa akses ke pernyataan yang dipercayakan oleh para korban kepada CAVR terjaga dan bahwa kerahasiaan bukti dan hak serta keamanan para pemberi pernyataan dihormati sepenuhnya. CAVR telah melakukan segala usaha, bekerjasama dengan Parlemen Nasional dan Kementerian Kehakiman, untuk menjamin bahwa hal ini dijamin setelah penutupan CAVR.

## Masa depan

Ini membawa saya pada butir terakhir yang berhubungan dengan isi Laporan. Sebagian besar kerja CAVR merupakan awal yang baik, tetapi masih banyak yang harus dilakukan—di bidang rekonsiliasi, pencarian kebenaran, pemulihan, dan keadilan.

Kami yakin bahwa CAVR telah menyumbang pada stabilisasi banyak komunitas lokal melalui program rekonsiliasinya. Tapi, banyak kasus belum ditangani dan perlu dikembangkan dan cara-cara kreatif menggunakan metodologi CAVR sehingga proses yang unik ini bisa dimanfaatkan untuk mengatasi konflik di masa mendatang. Di bidang pencarian kebenaran, CAVR tidak berhasil memberikan jawaban definitif pada banyak masalah. Diharapkan bahwa proses pengungkapan kebenaran bisa berlanjut, berdasarkan bukti yang telah dikumpulkannya dan pengungkapan informasi baru melalui penelitian lanjutan. Juga masih harus dilakukan kerja untuk menyebarluaskan Laporan ini dan untuk melaksanakan rekomendasi-rekomendasinya. Ini adalah hal yang belum selesai yang sangat mutlak bagi proses pemulihan, pendalaman budaya hak asasi manusia, dan kekuasaan hukum, serta mengambil pelajaran secara nasional maupun internasional. Agar hal ini bisa terjadi, diperlukan suatu lembaga tindak lanjut yang efektif. Lembaga ini juga diperlukan untuk menjamin keamanan, pengelolaan yang profesional, dan pengembangan arsip-arsip CAVR.

## Penghargaan

Setelah tampil menonjol di seluruh bagian negeri dan melalui audiensi publik yang disiarkan ke seluruh negeri, CAVR tampil tidak menonjol selama 12 bulan lebih. Sebagian pihak mungkin bertanya-tanya jangan-jangan kami tertidur ketika bekerja! Kenyataannya ialah bahwa kami terlibat penuh dalam menyelesaikan tugas kedua mandat kami pada bulan-bulan terakhir—pencarian kebenaran—dan ini terbukti merupakan kegiatan yang amat sangat sulit, menuntut banyak usaha, dan memakan waktu.

Karena itu saya ingin memulai daftar penghargaan ini dengan mengakui pengertian dan dukungan yang kami dapatkan dari Parlemen Nasional, khususnya yang memberi kami tambahan waktu pada tiga kali kesempatan untuk melengkapi pekerjaan kami. Terimakasih kepada Presiden Francisco Guterres Lú-Olo dan semua rekan Parleментар Anda.

Para pakar mengatakan bahwa salah satu syarat untuk keberhasilan komisi kebenaran adalah tingkat dukungan atau penerimaan resmi. CAVR telah memenuhi syarat ini. Sebagai Komisaris yang berasal dari generasi yang relatif muda pasca-1975, kami sekarang bisa mengakui bahwa kami merasa gentar harus menangani masalah-masalah yang pelaku-pelaku kuncinya adalah para pemimpin terhormat dari generasi yang lebih tua. Ternyata kami tidak perlu cemas dan kami merasa banyak berutang pada para pemimpin politik kita, yang pengertian dan dukungannya telah sangat berarti bagi kami.

Bapak Presiden, Anda telah lama menjadi penganjur rekonsiliasi, dan pendekatan CAVR banyak mengambil dari semangat inklusif yang merupakan ciri kepemimpinan Anda. Kami sangat menghargai dukungan Anda saat pada banyak kesempatan kami meminta nasihat Anda. Terimakasih juga atas pembagian pengetahuan Anda kepada Komisi, kesaksian publik Anda, dan bantuan Anda mencari dana. Kami juga berutang budi kepada Anda, Perdana Menteri. Dukungan publik yang tegas dari

Anda kepada CAVR dari awal, penghormatan total pada independensi Komisi, dan di tengah-tengah banyak tugas Anda, Anda meluangkan waktu membantu pencarian dana, memberikan wawancara, dan memberikan kesaksian publik. Hal yang sama juga disampaikan kepada Menteri Luar Negeri dan Kerjasama Dr José Ramos-Horta, yang selain bantuan-bantuan lain, menggunakan aksesnya pada fora internasional untuk berbicara untuk kepentingan CAVR. Karena dukungan dari mereka, yang juga banyak diberikan oleh partai-partai politik, komunitas keagamaan, para Uskup Katolik, dan masyarakat sipil, CAVR bisa memusatkan perhatian pada kerjanya yang sensitif, bebas dari kontroversi dan keharusan memberikan waktu untuk hal-hal yang tidak perlu.

Kami juga berterimakasih kepada Ketua Pengadilan Banding, Dr Claudio Ximenes, dan Jaksa Agung Dr Longuinhos Monteiro, atas dukungan pribadi dan kelembagaan mereka. Kedua lembaga itu merupakan unsur penting dalam keberhasilan Proses Rekonsiliasi Komunitas CAVR.

CAVR juga mendapatkan dukungan yang baik dari masyarakat internasional, khususnya dalam bentuk hibah uang dan sumberdaya manusia. Karena keadaan ekonomi Timor-Leste, semua dana untuk CAVR harus diperoleh dari luar. Lebih daripada 25 pemerintah dan badan dana menanggapi permintaan kami dan memberikan dana yang diperlukan untuk merehabilitasi dan mengelola enam kantor, menempatkan hampir 300 staf di lapangan, memberikan transportasi, peralatan, dan sumberdaya yang diperlukan untuk kerja kami dan memberikan pakar penasihat mengenai berbagai bidang kepada CAVR. Nama-nama dan sumbangan-sumbangan donor-donor ini bisa dibaca pada Laporan. Atas nama semua rekan saya di CAVR, saya menyampaikan terimakasih kepada semua yang telah dengan sangat jujur mengakui bahwa pembangunan perdamaian adalah dasar bagi perkembangan yang berkelanjutan dan atas dukungan praktis dan moral yang tulus selama lima tahun ini.

Terakhir, tetapi bukan yang paling tidak penting, saya mengucapkan terimakasih kepada enam Komisaris Nasional dan 28 Komisaris Regional dan semua staf yang mengagumkan atas sumbangan mereka. Lebih daripada 500 orang termasuk para Komisaris, staf nasional dan internasional, dan sukarelawan jangka pendek telah bekerja di atau untuk CAVR sejak 2001. CAVR adalah suatu karya agung yang ambisius serta petualangan ke wilayah tak dikenal bagi kita semua. Lebih daripada satu kali ia mengancam menenggelamkan kita secara emosional dan organisasional. Kerja ini terutama sangat intens dan melelahkan dalam 12 bulan terakhir. Saya tahu bahwa bekerja di CAVR adalah pengalaman yang bermakna unik dan mendalam bagi semua rekan saya, para Komisaris dan staf. Meskipun demikian, Timor-Leste berutang besar pada mereka semua atas sumbangan yang mereka berikan untuk kedamaian, persatuan, dan hak asasi manusia di negara baru kita.

## Penutup

Sebelum menyampaikan Laporan kami, saya hanya punya satu hal lagi untuk dikatakan sebagai penutup. Keinginan paling dalam dari semua pihak di CAVR ialah

agar Laporan ini diterima dengan semangat yang sama ketika ia ditulis—dengan keterbukaan, kejujuran, kasih yang mendalam kepada orang-orang yang telah menderita, komitmen yang nyaris fanatik pada tiadanya kekerasan, dan keteguhan untuk tidak pernah membiarkan apa yang telah terjadi yang ditulis dalam Laporan ini terjadi lagi pada rakyat dan negeri kita yang indah.

Atas nama para rekan Komisaris saya dan semua staf CAVR, sekarang merupakan kehormatan dan keistimewaan bagi saya untuk menyerahkan Laporan CAVR kepada Yang Mulia Bapak Presiden.

